



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 247 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 13 Ayat (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang memohon bantuan keuangan dan mempersingkat jalur birokrasi, maka dipandang perlu pendelegasian Wewenang dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk penandatanganan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pendelegasian Wewenang Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2537/c.c2.1/DU/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Perubahan Pengelolaan Dana BOP PAUD dari Pusat ke DAK Kabupaten/Kota.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021.
  3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Honorer Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6).
  4. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Honorer Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis se-Kota Banjarmasin pada Program Pengelolaan Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021.
  5. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 145 Tahun 2021 tentang Penetapan Pemberian Insentif untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kota Banjarmasin Tahun 2021.
  6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor 420/31.1-PAUDNI/Dipendidik/2021 tentang Penetapan Pemberian Iuran Badan Penyelenggara Jasa Sosial Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat bagi Guru Honor Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis se-Kota Banjarmasin Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :**
- Pendelegasian Wewenang dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk Penandatanganan :
- a. Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan, untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis se-Kota Banjarmasin;

- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima untuk Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis se-Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- c. Penetapan Alokasi Dana Pemberian Insentif dan Pemberian Iuran Badan Penyelenggara Jasa Sosial Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat untuk Guru Honor Pendidikan Anak Usia Dini untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis se-Kota Banjarmasin;
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima untuk Pemberian Insentif dan Pemberian Iuran Badan Penyelenggara Jasa Sosial Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat untuk Guru Honor Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis se-Kota Banjarmasin Tahun 2021.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Maret 2021  
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR